



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Fungsi Media Sosial Facebook dan Twitter Dalam Mendorong
Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis Di Tunisia dan
Mesir**

Skripsi

Oleh

Tara Rasasti

2013330031

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tara Rasasti
Nomor Pokok : 2013330031
Judul : Fungsi Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Mendorong Proses
Transisi Menuju Masyarakat Demokratis di Tunisia dan Mesir

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 11 September 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Giandi Kartasmita, S . IP , M. A

: 

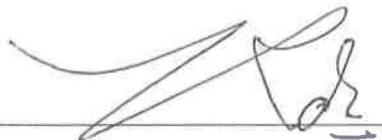
Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota

Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tara Rasasti

NPM : 2013330031

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Fungsi Media Sosial Facebook dan Twitter Dalam
Mendorong Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis Di
Tunisia dan Mesir

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 September 2017



Tara Rasasti

ABSTRAK

Nama : Tara Rasasti

NPM : 2013330031

Judul : Fungsi Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Mendorong Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis Tunisia dan Mesir

Media sosial yang membentuk *social networking site* membantu masyarakat Tunisia dan Mesir dalam proses transisi menuju masyarakat demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa keterkaitan antara rezim otoritarian Tunisia dan Mesir sebelum revolusi terjadi dan seberapa penting peran media sosial dalam membantu proses pencapaian masyarakat yang demokrasi. Pada skripsi ini penulis memilih dua situs media sosial, yaitu *Facebook* dan *Twitter*, untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana dukungan media sosial *Facebook* dan *Twitter* dalam mendorong proses transisi menuju masyarakat demokratis Tunisia dan Mesir?”** Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi untuk menjawab pertanyaan diatas. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori *New Media* dan didukung dengan konsep dari *Social Networking Site* penulis menemukan bahwa media sosial *Facebook* dan *Twitter* merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat kelas menengah Tunisia dan Mesir dalam merencanakan gerakan sosial untuk mencapai tujuan sebuah negara demokrasi.

Kata Kunci: otoritarian, *middle class*, revolusi, *New Media*, *Facebook*, *Twitter*, Tunisia, Mesir, demokrasi

ABSTRACT

Name : Tara Rasasti

NPM : 2013330031

Title : *The Function of Social Media Facebook dan Twitter in Pushing a Transition Process Towards a Democratic Citizenship in Tunisia and Egypt*

*Social media forms a social networking sites that helps the Tunisians and Egyptians in the transition to be a democratic citizen. This research aim to analyze some of connection between tunisian and egyptian authorian regime before the revolution happens and how important the role of social media in reaching a democratic citizenship. In this thesis, writer chose two social media sites, Twitter and Facebook to answer the research question "**how is the support of social media Twitter and Facebook in pushing a transition process towards a democratic citizenship in Tunisia and Egypt?**". Writer uses a qualitative method with content analysis to answer the question above. In this research, with the use of New Media Theory and supported by the concept of Social Networking Site writer found that social media Facebook and Twitter owns an important role as a public room where middle class citizen in Tunisia and Egypt plans a mass movement to achieve a democratic state.*

Keyword: authoritarian, middle class, revolution, New Media, Facebook, Twitter, Tunisia, Egypt, democracy

Kata Pengantar

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan rahmatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Dukungan Media Sosial Facebook dan Twitter Dalam Mendorong Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis Di Tunisia dan Mesir”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kelulusan pada jenjang strata satu untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya, dapat memberikan ilmu serta pemahaman terkait isu yang terjadi. Namun, Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap kekurangan yang ada dapat disampaikan melalui kritik ataupun saran. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengembangan dari penelitian ini dan berguna di masa yang akan datang.

Bandung, 31 Oktober 2017

Peneliti

Thankful. Grateful. Blessed.

Irawan Darmanto & Ira Dewi

Kata terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas semua dukungan moral ataupun materiil, juga doa dan harapan yang tidak pernah putus, yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan saya, khususnya dalam menjalani masa perkuliahan selama 4 tahun di Bandung. Dengan bangga saya persembahkan Skripsi ini untuk kalian; sahabat, mentor, orangtua terbaik di dunia.

Kendra Bagaskara & Keshia Aninditha

Terimakasih sudah menjadi kawan disaat situasi adalah lawan. Memiliki kalian berdua sebagai saudara merupakan sebuah keberuntungan.

Theodori Raphael Monti Tambunan

Semester lima di kampus 3 telah mempertemukan aku dan kamu. Dapat merasakan kesabaran, ketulusan, dan kehangatan yang tidak berkesudahan darimu adalah berkat yang tidak terduga tetapi sangat berharga. Terimakasih sudah melengkapi buku, pesta, cinta- ku Ti. Aku bahagia.

Daftar Isi

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Akronim.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.3 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kajian Literatur.....	13
1.4.1 Kajian Literatur.....	13
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	19
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
1.5.1 Metode Penelitian.....	42
1.5.2 Jenis Penelitian.....	43
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
1.6 Sistematika Pembahasan.....	44

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DIBAWAH REZIM OTORITARIAN TUNISIA DAN MESIR

2.1 Rezim Tunisia di Era Ben Ali	
2.1.1 Partai Tunggal Yang Memegang Kuasa.....	48
2.1.2 Keberadaan Kelompok Oposisi.....	51
2.1.3 Kekuatan Militer Sebagai Faktor Ketahanan Rezim.....	52
2.1.4 Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dibawah Rezim Ben Ali.....	53

2.1.5 Faktor Internal Pendorong Revolusi.....	56
2.1.5.1 Terbatasnya Lapangan Pekerjaan.....	56
2.1.5.2 Kemiskinan.....	58
2.1.5.3 Angka Korupsi Tinggi.....	58
2.2 Dinamika Pemerintahan Mesir dibawah Pimpinan Hosni Mubarak.....	59
2.2.1 Eksistensi Rezim Otoritarian di Mesir.....	60
2.2.2 Lembaga Keamanan Negara Sebagai Kunci Pemegang Stabilitas.....	64
2.2.3 Batas Merah Untuk Media Mesir.....	66
2.3 Masyarakat Tingkat Menengah Sebagai Pemicu Gerakan Demokratisasi.....	70
 BAB III PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENCAPAIAN MASYARAKAT DEMOKRASI TUNISIA DAN MESIR	
3.1 Masyarakat di Era Digital Menghadapi Perkembangan Internet.....	76
3.2. Media Sosial sebagai Ruang Publik Masyarakat Tunisia dan Mesir.....	79
3.2.1 Peran <i>Facebook</i> sebagai Penentu Arah Revolusi Tunisia dan Mesir....	83
3.2.2 Twitter sebagai Sumber Informasi Masyarakat Tunisia dan Mesir.....	87
3.3 Upaya Tunisia dan Mesir Menuju Masyarakat Demokratis.....	91
 BAB IV KESIMPULAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	111

Daftar Akronim

CPI

Corruption Perception Index

ICT	Information and Communication Technology
MENA	Middle East and North Africa
NDP	National Democratic Party
RCD	Contitutional Democratic Rally
SNS	Social Networking Site

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi mendorong terbentuknya dunia tanpa batas. Konektivitas antar satu individu dengan individu lainnya dengan basis virtual dapat meningkatkan produktivitas, alat kesehatan, pendidikan, dan sistem perekonomian. Konektivitas yang terbangun saat individu saling terhubung menciptakan perasaan setara, dengan akses yang sama ke setiap platform teknologi, informasi dan sumber online, walaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan yang menonjol¹. Kendala dan tantangan yang ada di dalam dunia nyata akan selalu ada, tetapi dengan adanya ekspansi dalam dunia virtual yang diadopsi oleh sekian milyar pemikiran manusia berarti memunculkan cara baru dalam menemukan informasi dan mengolah sumber yang ada untuk menyelesaikan masalah, walaupun solusi yang ada mungkin tidak sempurna.

Dunia terbentuk dari banyaknya Negara mandiri yang berdaulat secara menyeluruh. Negara-negara ini memiliki karakter yang terbangun dari beraneka ragam budaya dan individu yang ada didalamnya. Adanya proses antar Negara untuk membangun kesinambungan satu sama lain diketahui sebagai Hubungan Internasional. Negara merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional, walaupun tidak dapat dielakkan bahwa berjalannya suatu sistem Negara juga dipengaruhi oleh aktor non-negara. Hubungan yang dibangun antara satu Negara atau Negara dengan aktor lainnya pada kenyataannya terbentuk kuat dan diarahkan oleh

¹ Schmidt, Eric. Cohen, Jared. 2013. *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business*. Alfred A. Knopf, Random House, Inc.

teknologi digital. Hubungan Internasional masuk pada era dimana munculnya teknologi digital berhasil menciptakan perubahan yang signifikan secara sosial, ekonomi dan politik.

Akses yang luas terhadap informasi membentuk suatu iklim baru yang mampu merubah sistem kerja atau ketentuan yang diberlakukan di suatu Negara. Peran Negara seakan digantikan oleh aktor digital, sehingga kadang muncul bias dari fungsi suatu Negara itu sendiri². Kegiatan berdiplomasi yang merupakan salah satu elemen penting dalam membangun kerjasama antar Negara saat ini bahkan mampu dilakukan secara elektronik. Ini merefleksikan bahwa teknologi digital berhasil membuktikan fungsinya sebagai alat untuk melakukan interaksi dan hubungan internasional diantara Negara, institusi internasional, organisasi, dan individu. Kemampuan untuk mengirim, menerima, dan membagikan pesan secara cepat dan mudah adalah salah satu terobosan besar dari teknologi digital. Platform dengan basis internet memungkinkan memproses pesan dalam bentuk teks, audio, bahkan visual.

Siapa pun yang memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi digital berarti memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi dan membagikan pengetahuan mereka di ranah diskusi global. Internet kadang dideskripsikan sebagai platform dimana tidak ada hukum yang mengatur dan tidak terikat pada suatu bentuk pemerintahan. Berbeda dengan Negara yang memiliki kekuatan besar, karena adanya kekuasaan atas infrastruktur konektivitas seperti menara transmisi, Negara juga mengatur keluar masuknya data Internet dan dapat pula membatasi konten. Negara dan masyarakatnya sama-sama mendapatkan keuntungan dari adanya jaringan konektivitas tetapi tidak dalam skala yang sama. Masyarakat memang dapat mengakses tetapi Negara mengisi posisi sebagai penjaga gerbang komunikasi itu sendiri³. Tetapi kembali pada kenyataan bahwa teknologi digital dapat menghantarkan Negara menjadi

² ibid

³ Schmidt, Eric. Cohen, Jared. Ibid hal 35

lebih kuat -memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Negara serta-merta akan mempersiapkan dirinya untuk melewati transisi ke dunia virtual, menekankan pada aliansi dan penggunaan kekuatan digital secara cerdas. Hubungan aliansi, persahabatan antar Negara, bahkan sikap permusuhan dapat meluas sampai ke dalam dunia virtual, berubah dari tahap tradisional ke dimensi modern. Dalam banyak cara, Internet dapat dilihat sebagai bukti riil dari kontemplasi teori anarki dalam Hubungan Internasional, *leaderless world*⁴.

Dengan adanya teknologi ini tercipta banyak sekali bentuk inovasi baru di dalam dunia internasional dan secara cepat dunia akan terbentuk sebagai *global village*. *Global Village* adalah keadaan yang tercipta saat seluruh individu terhubung dengan mudah satu sama lain tanpa memandang adanya batas Negara, seakan seluruh masyarakat ada di dalam suatu desa yang besar tanpa batas untuk melakukan komunikasi. Secara tidak langsung, Negara dan seluruh elemennya diwajibkan untuk mampu beradaptasi dengan pergerakan teknologi yang kian cepat. Adanya ketidakseimbangan dalam pergerakan teknologi dan kemampuan dari aktor untuk memanfaatkan pergerakan tersebut akan menciptakan suatu keadaan renggang, yang berpengaruh buruk bagi jalannya suatu sistem. Fenomena hubungan internasional saat ini berorientasi pada revolusi digital. Penggunaan teknologi dapat membawa suatu perubahan besar bila digunakan secara efektif. Salah satu situasi internasional yang berhasil melibatkan peran teknologi dengan pemanfaatan yang efektif sehingga membawa perubahan besar adalah *Arab Spring*.

Arab Spring merupakan suatu peristiwa internasional dimana terjadi kebangkitan dunia Arab yang lahir di Timur Tengah. Timur Tengah terkenal sebagai wilayah yang kaya dengan hasil minyak sehingga dapat dianggap pula sebagai pemasok minyak terbesar dunia. *Arab Spring* sendiri bila diartikan secara literal bermakna sebagai bentuk pemberontakan yang

⁴ opcit

dimulai dari Tunisia pada bulan Desember tahun 2010⁵. Pemberontakan dimulai dari Masyarakat yang menginginkan mundurnya Presiden Tunisia yang menjabat melalui kudeta yaitu Zine El Abidin Ben Ali yang sudah menjabat sejak 7 November 1987 sampai dengan 14 Januari 2011⁶.

Penyulut terjadinya gerakan masyarakat yang menginginkan kejatuhan rezim pemerintahan Tunisia saat itu adalah adanya aksi pembakaran diri seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang merasa tidak puas atas berjalannya sistem pemerintahan Ben Ali. Situasi tersebut tersebar lewat media sosial dan menarik empati juga menyulut emosi masyarakat Tunisia. Mereka kemudian melakukan gelombang aksi turun ke jalan dalam skala besar dan juga demonstrasi karena ketidakpuasan yang mendalam dan kemarahan mereka yang tidak dapat dibendung lagi akan kepemimpinan Ben Ali, membuat Ben Ali diturunkan secara paksa oleh rakyat Tunisia. Konflik internal yang terjadi di Tunisia inilah yang menjadi bibit dari fenomena *Arab Spring*. Dengan adanya teknologi digital dan lewat platform internet informasi dari peristiwa di Tunisia tersebar secara luas dan cepat sehingga pada akhirnya diketahui oleh negara-negara lain di sekitarnya lewat media dalam bentuk daring dan akhirnya menjadi “triger” bagi masyarakat di Mesir.

Kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa Ben Ali, tetap mengilhami rakyat Mesir, untuk melakukan hal yang sama, mengingat rakyat Mesir memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta sifat kekuasaan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih. Penyebab revolusi di Mesir dikarenakan seorang warga Mesir membuat laman web di situs jejaring sosial tentang keadaan negaranya, sejak itu warga tersebut menjadi korban dari kebrutalan rezim Mubarak

⁵Timeline of The Arab Spring, http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Arab_Spring#2010, <http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline>, diakses 27 Agustus 2016

⁶ Jones Siraet, Harian Umum Pelita: 22 Tahun Pemerintahan Ben Ali Mengubah, 29 April 2014, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=8267>, diakses 27 Agustus 2016

yang disiksa sejumlah polisi berpakaian sipil di suatu warung internet di Kota Alexandria⁷. Revolusi di Mesir yang terjadi dikatakan sebagai gerakan yang didorong oleh kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini paralel dengan krisis politik di Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera menggulingkan rezim Mubarak⁸.

Mengacu pada hukum sebab-akibat, Revolusi di kawasan Timur-Tengah bukan tanpa sebab, dikarenakan suatu peristiwa yang dimulai dari suatu alasan untuk melakukannya. Demikian pula rakyat yang melakukan revolusi memilih alasan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dinilai korup, otoriter, dan menyebabkan adanya marjinalisasi dalam kehidupan rakyat baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Perilaku yang dilakukan oleh rakyat di wilayah merepresentasikan gerakan *people power* sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial politik dan terciptanya demokrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Era globalisasi dipahami sebagai “berkah” dari kemajuan cara berpikir manusia, dimana teknologi mengambil banyak peran dalam pergerakannya. Munculnya globalisasi mendorong komunikasi internasional menjadi sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan karena adanya perkembangan dunia menjadi sebuah bentuk *global village*, yang berhasil membuat batas Negara yang satu dan Negara lainnya menjadi tidak jelas. Dunia yang sedemikian luas diibaratkan menjadi sebuah desa kecil dimana penduduk di suatu belahan dunia dapat dengan mudah mengakses informasi apa saja tentang penduduk di belahan dunia lainnya. Era globalisasi tidak saja mengaburkan batas-batas Negara tetapi juga mengaburkan

⁷ Muzada, Faisal I. 2013. Demokratisasi Tunisia dan Pengaruhnya Terhadap Negara-Negara Arab

⁸ Tamburaka Apriadi. 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 75

batas-batas komunikasi, ekonomi, politik, dan budaya. Adanya paham mengenai *technological deterministic* yang menjelaskan bahwa teknologi merupakan salah satu faktor mendasar dalam perubahan sosial⁹. Adanya perubahan dari sebuah sistem tradisional ke sistem yang modern difasilitasi dengan perkembangan teknologi.

Perubahan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam bidang politik. Dalam kasus *Arab Spring*, dengan adanya kemajuan dalam hal teknologi, lewat platform internet dan media sosial, masyarakat kemudian memiliki kemampuan untuk membentuk dan melayangkan suatu gerakan yang bertujuan untuk meruntuhkan sistem pemerintahan terdahulu. Bukan hal yang mustahil di era teknologi digital ini timbul gerakan kekuatan tertentu dengan tujuan akhir untuk mengkooptasi kekuasaan dan sekaligus kedaulatan suatu Negara yang berujung pada gangguan dan ketidakstabilan sistem. *Arab Spring* terjadi karena banyak alasan, salah satunya adalah keberadaan media sosial dan kekuatan yang dimilikinya untuk menunjukkan suatu kejadian yang berdasar pada penindasan politik.

Kebangkitan dunia Arab yang lahir di Timur Tengah yang berbentuk pemberontakan (*Arab Spring*) dimulai di Tunisia. Pemberontakan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2010 dimulai dari Masyarakat yang menginginkan mundurnya Presiden Tunisia yang menjabat melalui kudeta yaitu Zine El Abidin Ben Ali yang sudah menjabat sejak 7 November 1987 sampai dengan 14 Januari 2011¹⁰. Diketahui bahwa Zine el Abidin Ben Ali dalam menjalankan roda pemerintahannya menyiratkan sifat diktator, sifat itu diikuti oleh berbagai bukti negatif dari pemerintahan seperti, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan fisik, pembungkaman media pers, tingginya angka pengangguran yang terhambat dalam menemukan pekerjaan yang layak sehingga pada akhirnya merujuk pada tingkat kesejahteraan yang buruk, angka

⁹ Shoelhi, Mohammad. 2009. Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik, hal 163-164, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

¹⁰ Jones Siraet, Harian umum Pelita: 22 Tahun Pemerintahan Ben Ali Mengubah, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=-8267>, diakses pada 18 Februari 2017

kemiskinan tinggi, serta kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik¹¹. Puncak dari ketidakadilan ini adalah terjadinya insiden bakar diri yang dilakukan oleh penjual sayur gerobak berlatar belakang pendidikan sarjana, Mohamed Bouazizi, di kota Sidi Bouzid pada tanggal 17 Desember 2010.

Bouazizi tewas dalam insiden tersebut. Pengorbanan Bouazizi adalah satu dari banyak cerita yang terungkap lewat media sosial yang berhasil menginspirasi masyarakat untuk merencanakan suatu pergerakan yang mengkritisi pemerintahan yang sedang berjalan dan memunculkan ide tentang demokrasi¹². Berita tersebut cepat tersebar dan mengundang reaksi simpati, kagum dan juga amarah terhadap insiden ini. Media sosial, seperti *Twitter* dan *Facebook* pun aktif digunakan penggunanya untuk menggalang aksi protes untuk membela Bouazizi yang akhirnya berujung protes untuk menggulingkan Ben Ali. Kemarahan masyarakat Tunisia yang tidak dapat dibendung lagi akan kepemimpinan Ben Ali, membuat masyarakat membuat gelombang aksi turun ke jalan dengan tujuan untuk menurunkan Ben Ali secara paksa oleh rakyat Tunisia. Konflik internal yang terjadi di Tunisia inilah yang menjadi bibit dari fenomena *Arab Spring*.

Apa yang terjadi di Tunisia tersebar dengan cepat lewat media sosial dan akhirnya menjadi *trigger* bagi masyarakat Mesir untuk melakukan hal yang serupa yakni melakukan penurunan paksa terhadap kekuasaan diktator Hosni Mubarak. Selama 30 tahun kepemimpinannya, Presiden Hosni Mubarak diyakini tidak memberi ruang dialektika bagi rakyatnya, dimana pada kenyataannya menyuarakan pendapat atau opini merupakan hak dasar yang dimiliki manusia. Hak-hak sipil dan kompetensi komunikatif rakyat secara sistematis direduksi oleh kebudayaan otoritarianisme. Ketika saluran aspirasi disumbat dan dikontrol secara ketat, manusia yang pada

¹¹ Lachen Achy, *Tunisia's Economic Challenges*, (The Carnegie Middle East Center: Desember 2011)

¹² Bouazizi Pria Yang Membakar Dirinya Sendiri, Pemicu Revolusi Tunisia, <http://www.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/bouazizi-pria-yang-membakardirinya-sendiri-pemicu-revolusi-tunisia.htm#.U03a66JfSKE>, diakses pada 17 Februari 2017

dasarnya memiliki sifat *zoon politican* (makhluk politik), lambat laun akan mencari alternatif lain untuk menyalurkannya. Salah satunya melalui media sosial daring yang cukup aman tetapi dapat menyentuh masyarakat secara luas, yakni situs jejaring sosial.

Keberanian masyarakat untuk memulai gerakan tersebut kembali lagi pada terjadinya gerakan di Tunisia. Tentu sangat sulit bagi pemerintah Mesir yang berdasar otoritarian untuk menerima kenyataan bahwa masyarakat yang biasanya aman dan tidak melakukan hal-hal yang mengancam pemerintahan dibawah pengawasan mereka, mulai berani untuk menyuarakan haknya dan mengambil tindakan yang terbilang ekstrem. Ini terbukti lewat tindakan yang diambil Presiden Hosni Mubarak yang memerintahkan penutupan semua saluran komunikasi termasuk internet dan situs daring jejaring sosial di dalamnya.

Beragam jenis revolusi yang terjadi pada beberapa negara di Timur Tengah memiliki persamaan latar belakang, yaitu karena adanya pengaruh kekuasaan diktator yang cenderung absolut dan identik dengan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam proses pencapaian negara demokrasi, masyarakat Tunisia dan Mesir menghimpun dukungan melalui berbagai media, terutama media sosial. Media Sosial sebagai satu wadah baru dalam menyuarakan perlawanan pemerintah berhasil mengumpulkan massa dengan niat dan tujuan yang sama. Jejaring Sosial (*Social Network*) saat ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik dan sosial di seluruh negara. Jejaring sosial mempengaruhi pemilihan-pemilihan umum politik dan berimbas pada perubahan sosial di berbagai belahan dunia. *Facebook* dan *Twitter* merupakan dua dari sekian banyak laman media *online* yang mengambil peranan penting atas kerusuhan¹³, kegelisahan, pemberontakan dan revolusi di Tunisia dan Mesir. Dari sini terlihat jelas bagaimana teknologi digital dalam bentuk media sosial tidak lagi terbatas sebagai gaya

¹³ Tim Eaton, *Internet Activism and The Egyptian Uprisings: Transforming Online Dissent Into OfflineWorld*, *BBC Media Action* vol. 9, April 2013, h. 5

hidup modern tetapi juga memiliki peran sebagai faktor pendukung *social movement*. Media sosial di kasus ini dapat dikatakan telah berkontribusi untuk memberikan efek domino yang luar biasa di fenomena *Arab Spring*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana peran media sosial khususnya *Facebook* dan *Twitter* dalam mendukung proses demokratisasi di Tunisia dan Mesir. Penulis akan mencari dan menelusuri data dari laman *Facebook* dan *Twitter* yang memberikan pengaruh besar dalam terjadinya demokratisasi ini dan bagaimana sistem penggunaan media sosial yang disebutkan di atas di Tunisia dan Mesir hingga dapat membantu terealisasinya gerakan-gerakan penggulingan rezim pemerintahannya. Batas waktu yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 2010 sampai dengan 2011.

Periode waktu tersebut digunakan dengan sebab sesuai dengan lini masa pelaksanaan gerakan demokratisasi di negara-negara Arab Timur, terutama Tunisia dan Mesir. Pembatasan waktu juga 2010-2011 dilakukan pula berkenaan dengan alasan bahwa upaya-upaya reformasi dan gerakan-gerakan yang terjadi untuk mencapai demokratisasi dimulai sejak tahun yang telah disebutkan. Penulis memfokuskan penelitian pada wilayah di Tunisia dan Mesir sebagai latar tempat terjadinya gerakan revolusioner ini dengan alasan di kedua negara ini merupakan dua negara utama yang dianggap sebagai *trigger* dari terbentuknya fenomena *Arab Spring*. Alasan lain yang menjadi dasar pengambilan negara Tunisia dan Mesir sebagai fokus penelitian adalah tingginya angka pengguna media sosial *Twitter* dan *Facebook* di kedua negara tersebut dalam masa gerakan demokratisasi dilakukan. Penelitian ini juga akan membahas beberapa aktor penting yang menjadi alasan dan yang ikut mendukung terjadinya demokratisasi di kedua negara yang telah disebutkan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap peran media sosial dalam mencapai tujuan demokratisasi di negara Tunisia dan Mesir. Maka penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Fungsi Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* Dalam Mendorong Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis Tunisia dan Mesir?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dukungan media sosial *Facebook* dan *Twitter* dalam proses transisi menuju masyarakat demokratis Tunisia dan Mesir. Semua yang akan dibahas di dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran media sosial *Facebook* dan *Twitter* dalam proses transisi masyarakat Tunisia dan Mesir menuju masyarakat demokrasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Secara akademis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pengkaji masalah-masalah internasional dalam mengkaji masalah masalah Timur Tengah, khususnya Revolusi Tunisia yang mempengaruhi demokratisasi di Mesir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Penulis juga berharap dari sisi pragmatis agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, terutama Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap negara-negara di Timur tengah dalam masalah demokrasi.

1.4 Kajian Literatur

Literatur utama yang akan dibahas berupa jurnal yang ditulis oleh Victoria Carty pada tahun 2014 dan diterbitkan oleh *International Journal of Contemporary Sociology* volume 51 dengan judul *Arab Spring in Tunisia and Egypt: The Impact of New Media on Contemporary Social Movements and Challenges for Social Movement Theory*¹⁴. Jurnal ini meneliti perihal besarnya dan seberapa pentingnya media komunikasi dalam mempengaruhi lingkungan politik dan juga dalam memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kontensius politik. Carty memiliki argumentasi bahwa pergerakan sosial yang terjadi di dalam 2 negara tersebut merupakan panggilan untuk memperluas *social movement theory* karena dengan adanya revolusi digital, terdapat parameter baru dimana suara sebuah kelompok atau individu yang menyampaikan kekhawatiran, informasi, atau opini bahkan protes sangat diperlukan. Munculnya teknologi digital telah membentuk sebuah kondisi baru aktivisme.

Segala gerakan sosial terbentuk oleh adaptasi teknologi yang akhirnya berpengaruh pada aktor yang terlibat dalam gerakan sosial contohnya adalah taktik-taktik gerakan sosial, lalu bagaimana para aktor membagikan dan mendistribusikan informasi. Dalam kenyataannya dalam berjalannya masa protes, masyarakat Tunisia dan Mesir melaporkan bahwa mereka menerima informasi tentang gerakan revolusi dari media sosial khususnya laman *Facebook* dan *Twitter*. Masyarakat kedua negara tersebut menganggap bahwa itu merupakan efek positif yang akhirnya memotivasi mereka untuk ikut serta dalam gerakan tersebut¹⁵.

¹⁴ Carty, Victoria, 2014, "Arab Spring in Tunisia and Egypt: The Impact of New Media on Contemporary Social Movements and Challenges for Social Movement Theory." *International Journal of Contemporary Sociology* 51(1): 51-80

¹⁵ Carty, Victoria, 2014, "Arab Spring in Tunisia and Egypt: The Impact of New Media on Contemporary Social Movements and Challenges for Social Movement Theory." *International Journal of Contemporary Sociology* 51(1): 51-80

Peneliti ke-2 adalah Abdesselem Mahmoud dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Redfame dengan judul “*Social Movements in Tunisia and Egypt: A Tale of Two Revolutions*” menjelaskan dalam kenyataannya gerakan sosial memiliki sumber di dalam jaringan masyarakat yang memiliki akses terhadap aliran sosial dan barang atau sumber daya. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Tunisia dan Mesir adalah gerakan yang *leaderless* dan secara general tidak didasari sama sekali sistem ideologi yang telah terdapat di tengah masyarakat. Informasi dan jaringan komunikasi basis internet seperti *Twitter* dan *Facebook* adalah alat dan *channel* utama dari kegiatan protes dan munculnya gerakan-gerakan anti-pemerintahan. Dalam sub-bab *Wireless and Leaderless Social Movement*.

Gerakan sosial mengarah pada suatu grup baru yang telah secara signifikan menjadi aktor yang menjalankan peran progresif lewat media cetak ataupun elektronik seperti surat kabar, radio, dan televisi. Tetapi, saat ini gerakan seperti itu tidak hanya diekspresikan dan dikomunikasikan lewat media tradisional seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Segala macam informasi dan komunikasi dapat disebarkan oleh *new wireless media networks* yang dapat diklasifikasikan sebagai media yang berdasar pada model daring. Terdapat argumen dari *Occupy Wall Street Clark* yang mengatakan bahwa adanya disparitas (perbedaan) cara pemberitaan oleh media tradisional dibandingkan dengan media sosial membenarkan titik bahwa media sosial, di dalam perihal cakupan gerakan sosial, telah menjadi produktif dalam kemampuan sebagai sumber informasi, untuk komunikasi dan organisasi dan menciptakan kesadaran dalam ruang publik digital. Peran media sosial sebagai aktor utama dianggap sebagai titik berat dari keberhasilan proses demokratisasi lewat pergerakan sosial dari masyarakat di kedua negara tersebut¹⁶.

¹⁶ Mahmoud, Abdesselem, 2015, “*Social Movements in Tunisia and Egypt: A Tale of Two Revolutions*”, *International Journal of Social Science Studies*, Vol.3, No.3.

Literatur yang ketiga merupakan sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Arab *Social Media Report* dibawah naungan Dubai School of Government dengan judul *Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter*. Di dalam jurnal ini dijabarkan berupa tabel-tabel angka presentase penggunaan *Facebook* dan *Twitter* selama *civil movement* di tahun 2011. Program pemerintah dan inovasi dari Dubai School of Government melakukan survey dengan target *Facebook* dan *Twitter* yang dianggap sebagai platform utama untuk masyarakat Tunisia dan Mesir saat melakukan pergerakan. Survey ini dijalankan selama 3 minggu di bulan Maret 2011. Survey dilangsirkan dalam 3 bahasa yakni Arab, Inggris, dan Prancis. Terdapat 126 responden dari Mesir dan 105 responden dari Tunisia. Dari kedua negara tersebut user media sosial yang disebutkan diatas mengatakan bahwa selama terjadi pergerakan media sosial tersebut digunakan untuk meningkatkan kepedulian tentang gerakan masyarakat, untuk menyebarkan informasi secara global, dan juga untuk mengorganisir para aktivis dan kapan aksi dilaksanakan. Kedua media media sosial tersebut tidak hanya digunakan untuk sekedar mencari hiburan belaka saja¹⁷.

Literatur keempat merupakan sebuah disertasi yang disusun oleh Madeline Stock dengan judul *The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising*. Didalam disertasi ini terdapat pembahasan mengenai bagaimana media sosial menjadi alat untuk mencapai kepentingan sebuah organisasi, selain itu sosial media sebagai alternatif pers, dan menjelaskan pula seberapa besar kemampuan sosial media untuk menggalang kepedulian akan suatu kondisi, tentu di dalam disertasi ini fokus pada masalah gerakan revolusi dari rakyat Mesir. Media Sosial dianggap memiliki kekuatan untuk mendirikan partai politik baru bahkan *civil society groups* ini merupakan bukti bahwa media sosial dapat menjadi pengunjuk rasa hingga memperoleh legitimasi politik. Tetapi di saat yang

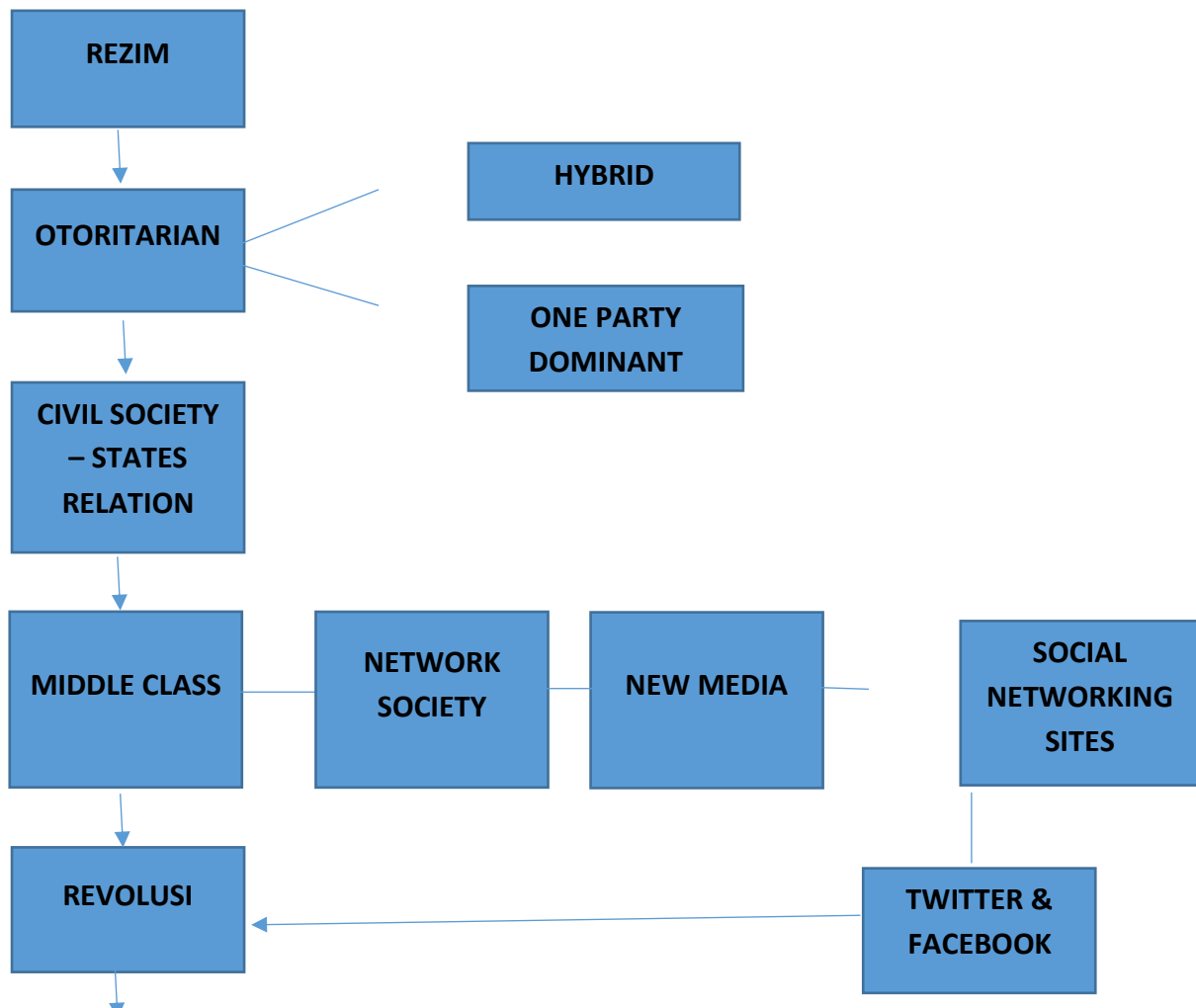
¹⁷ Arab Social Media Report, 2011, "Civil Movements: The Impact of *Facebook* and *Twitter*", The Dubai School of Government (DSG). Vol.1, No.2.

bersamaan Stock menulis pendapat yang kebalikan dari penjelasan sebelumnya mengenai betapa kuatnya peran media sosial. Stock menulis bahwa pada dasarnya para pencipta media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* tidak berfikir bahwa apa yang mereka ciptakan akan melahirkan suatu revolusi atau membawa perubahan yang sangat besar walaupun memang peran media sosial dapat dikatakan sebagai kendaraan perubahan, tetapi pada dasarnya sebuah pergerakan revolusi dimulai dari pemikiran dan imajinasi dari suatu kelompok masyarakat yang memang sudah jenuh atas konsisi pemerintahannya¹⁸.

Dari keempat sumber literatur diatas semuanya memiliki satu kesamaan yakni ditonjolkannya peran sosial media, *Twitter* dan *Facebook*. Literatur tersebut memiliki kesamaan pemikiran dengan penulis di dalam melihat betapa pentingnya media sosial dalam proses demokratisasi Tunisia dan Mesir sehingga penulis dapat menganalisis dengan mudah efektivitas dari peran media sosial dalam proses demokratisasi Tunisia dan Mesir. Namun, penulis akan lebih memperkaya penelitian ini dengan mencari tahu aspek-aspek pendukung alasan bahwa media sosial memang membawa pengaruh yang besar dalam pencapaian kepentingan masyarakat di Mesir dan Tunisia tahun 2010-2011.

¹⁸ Storck, Madeline, 2011, "*The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian Uprising*", University of St Andrews.

1.4.2 Kerangka Pemikiran



Dalam studi Hubungan Internasional, setiap individu dianggap sebagai bagian dari negara, baik itu untuk membantu mencapai keamanan, kesejahteraan, serta keteraturan sistem di suatu negara. Sifat lain dari Ilmu Hubungan Internasional adalah adanya fakta bahwa negara-negara di dunia saling berkaitan satu sama lain dalam berbagai isu (*cross boundaries*¹⁹). Di dalam Hubungan Internasional pula dapat diketahui bahwa negara bukan lagi aktor utama yang dianggap memberikan dampak besar dalam keberlangsungan sistem internasional. Dunia Internasional saat ini perlahan mulai berubah menjadi satu bentuk dunia yang berbasis teknologi. Segala hal mengacu pada pergerakan teknologi, sehingga adanya perubahan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik juga disesuaikan dengan pola pergerakan teknologi itu sendiri. Keberadaan dari teknologi itu sendiri menciptakan suatu bentuk jaringan yang mampu menghubungkan satu masyarakat dengan masyarakat lain di belahan dunia yang

¹⁹ Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2010. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* Edisi ke-4. Oxford/New York: Oxford University Press Inc

berbeda. Terjadi situasi dimana teknologi berevolusi yang akhirnya menghasilkan suatu perubahan sosial.

Masyarakat yang pada awalnya masih menggunakan cara tradisional perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat modern. Mulai ada pemanfaatan teknologi oleh masyarakat yang digunakan untuk mempermudah sistem kerja sehari-hari. Terdapat perubahan kearah yang lebih baik berkat pemanfaatan teknologi yang efisien. Masyarakat pun dapat dengan mudah memperluas jaringan sosial yang dimiliki dengan menggunakan platform teknologi berbasis internet. Masyarakat terjun dalam suatu komunitas dimana batas-batas Negara bukanlah halangan untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat di belahan dunia lain. Individu dapat memperkenalkan diri secara viral dan membentuk sebuah identitas yang diakui secara global. Di era ini perekonomian juga mengacu pada metode yang lebih modern. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara daring, struktur organisasi juga dapat terbentuk dalam wujud web. Teknologi akan menjadi sangat berguna dan efektif saat seseorang menggunakannya secara modern. Teknologi merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tren sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Modal yang berharga di era teknologi berbentuk informasi. Masyarakat pun mulai berubah menjadi pelaku *knowledge economy* dimana semua orang yang memiliki sebuah ide atau gagasan yang dapat dikategorikan sebagai informasi berusaha untuk membagikannya secara luas dan cuma-cuma. Informasi terkecil hingga besar dapat dikategorikan sebagai sebagai komoditi²⁰. Kemudahan berbagi informasi dan berkomunikasi membangun suatu *Network Society*. Berangkat dari fakta bahwa hubungan lintas negara merupakan hal yang

²⁰ Castells, Manuel. 2010. *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishing.

mutlak dalam Ilmu Hubungan Internasional, maka tentu komunikasi antar aktor yang terintegrasi sangat diperlukan.

Konsep yang selanjutnya dipakai ialah konsep demokratisasi. Demokratisasi ialah sebuah proses atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Demokratisasi adalah suatu bentuk perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi dapat juga disebut sebagai masa transisi dari pemerintahan yang non-demokrasi ke bentuk lain dari adanya pembagian kekuasaan dan akuntabilitas antara pemerintahan dan publik di dalam suatu rezim yang baru²¹. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Demokrasi sendiri menurut pengertiannya ialah pemerintahan oleh rakyat. Banyak yang mengatakan konsep demokrasi ialah sebuah konsep pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi juga diartikan sebagai simbol kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. Sebaliknya, pemimpin justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat sesuai dengan aturan-aturan hukum dan pendapat Imam²². Indikator perkembangan suatu negara dapat dilihat dari berjalannya sistem pemerintahan yang demokrasi di negara tersebut. Demokrasi meningkatkan kebebasan yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain, yakni kebebasan penentuan nasib sendiri secara individual maupun bersama serta kebebasan dalam tingkat otonomi moral²³.

Mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah masih berada dibawah bayang-bayang rezim otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. Rezim merupakan seperangkat

²¹ Bassiouni, Cherif. 1998. *Democracy: Its Principles and Achievement, Toward a Universal Declaration on the Basic Principles of Democracy: From Principles to Realisation*. Hal 6. Inter-Parliamentary Union, Geneva

²² Riza, Sihbudi. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Mizan Publika: Jakarta Selatan. Hal 76.

²³ Anas Urbaningrum. 2004. *Islam-demokrasi, pemikiran Nurcholis Madjid*. Republika: Jakarta. Hal 20-23

prosedur dan aturan yang bersifat formal dan informal yang dijalankan oleh pemegang kebijakan di suatu negara²⁴. Periode sementara dimana sekelompok orang mengambil alih pemerintahan dan lengser hanya dalam hitungan hari tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk rezim, begitupun dengan adanya masalah atau selingan yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat tidak dapat selalu diartikan sebagai kejatuhan atau keruntuhan rezim²⁵. Menurut Linz dan Stepan terdapat empat jenis bentuk rezim yang non-demokratik, yakni authoritarian, totalitarian, post-totalitarian dan sunltanistik²⁶. Masing masing rezim dibedakan berdasarkan dengan faktor pluralism, ideologi, mobilisasi, dan kepemimpinan.

. Dari keempat rezim ini dapat dikatakan jenis rezim otoritarian adalah rezim yang paling menarik perhatian para penstudi²⁷. Mengacu pada Geddes, terdapat beberapa tipe dari rezim otoritarian dan dengan mengkategorikannya akan menghasilkan penjelasan yang signifikan. Menurut Geddes, perbedaan insentif menjadi dasar pemilahan tipe-tipe otoritarian. Terdapat insentif militer, partai tunggal, dan rezim personalis²⁸. Proses dari transisi akan mengacu pada masing-masing tipe rezim tersebut. Rezim otoritarian yang mendapat insentif militer dikatakan lebih mementingkan kesatuan dari militer itu sendiri sehingga para pekerja dari institusi tersebut tidak akan mengisi jabatan atau kursi pemerintahan dan fokus pada penguatan intitusinya dalam menghadapi perubahan rezim. Sedangkan rezim dengan partai tunggal dikatakan cenderung menegosiasikan transisi kekuasaan.

Pada tahun 2003 Geddes memperbaharui konsepnya dengan membagi menjadi 4 jenis rezim, yakni *one party dominant*, militer, personalis, dan hybrid. Rezim *one party dominant* merupakan rezim dimana sebuah organisasi partai memiliki kemampuan untuk

²⁴ Geddes, Barbara. 2003. *Paradigms and Sand Castles*, p. 70

²⁵ Ezrow, Natasha M. 2011. *Dictators and dictatorships : Understanding authoritarian regimes and their leaders*. Page 55. The Continuum International Publishing Group 80 Maiden Lane, New York, NY 10038 The Tower Building, 11 York Road, London SE1 7NX

²⁶ Stepan, A. C., & Linz, J. J. (1996). *Toward consolidated democracies*. *Journal of Democracy*, 7(2), 14-33.

²⁷ *ibid*

²⁸ Geddes, B. (1999). *What do we know about democratization after twenty years? Annual review of political science*, 2(1), 115-144.

melatih kekuatan atas pemimpinnya di sebagian waktu, terdapat kontrol dalam proses pemilihan pejabat pemerintahan, mengorganisir jalannya distribusi kepentingan dari pendukung, dan memobilisasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan menunjukkan dukungan penuh terhadap partai yang dominan. Konsep *one-party dominant* menurut Geddes dibagi menjadi dua kriteria. Kriteria pertama adalah tidak terjadi pergantian pemerintahan dalam jangka waktu yang lama. Kriteria kedua adalah terjadi situasi dimana pihak yang memerintah mengambil bagian terbesar di pemungutan suara dalam kegiatan pemilihan umum atau lebih dari 2/3²⁹.

Tujuan dari kriteria pertama adalah untuk berfokus pada sistem di mana beberapa elemen kompetisi dalam pemilihan umum diatur sedemikian rupa sehingga pemerintah selalu berada dalam situasi yang diuntungkan (menang). Stabilitas pemerintah dianggap sebagai elemen penting untuk membedakan rezim suatu negara dengan negara lain. Kriteria kedua disisi lain memiliki tujuan untuk membantu memahami kasus dimana suatu partai memiliki dominasi kuat dalam suatu sistem pemilihan multipartai dan tidak terdapat lawan yang setara untuk menjadi lawan, sehingga partai yang berkuasa tidak pernah kehilangan kendali atas eksekutif dan telah menguasai setidaknya dua pertiga kursi legislatif dalam semua pemilihan

30 .

Rezim militer disisi lain didefinisikan sebagai salah satu rezim dengan kelompok petugas keamanan yang menentukan siapa yang akan memimpin jalannya suatu negara dan memiliki pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Rezim Personalist sendiri merupakan rezim yang berbeda dari rezim militer dan partai tunggal karena segala pengambilan keputusan dan akses ke dalam pemerintahan bergantung pada kebijaksanaan

²⁹ ibid

pemimpin individual. Sedangkan bentuk rezim yang terakhir adalah rezim hybrid yang mengacu pada situasi dimana terdapat kombinasi ketiga elemen rezim yang sebelumnya.

Selain itu dalam bentuk rezim otoritarian terdapat 2 jenis diferensiasi mengenai jenis pemimpin, yaitu *hard-liners* dan *soft-liners*. Pemimpin yang dikatakan *hard liners* berperilaku berdasarkan pada kesempatan-kesempatan yang dianggap menguntungkan dan tujuan politikal juga ekonomi jangka pendek. Para pemimpin hard liners melihat demokrasi sebagai misi yang harus disingkirkan. Di sisi lain, tipe soft liners melihat lewat sudut pandang berbeda. Kalkulasi dari segala tindakan yang mereka lakukan berdasarkan pada tujuan politik dalam jangka panjang dan pengakuan akan adanya suatu bentuk pemerintahan baru dengan rezim yang berbeda³¹. Karakter otoritarian dikatakan mengekang kebebasan individu. Sementara kebebasan individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi. Demokrasi juga terkait erat dengan HAM. Sebuah negara yang mengklaim dirinya demokrasi, harus menghormati HAM³². Dengan mengangkat masalah HAM, apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir berbeda dengan konsep demokrasi yang berkaitan dengan HAM.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggunakan konsep demokrasi dan demokratisasi sebagai bahan pendukung penelitian dalam menjelaskan penyebab terjadinya demokratisasi di Tunisia dan Mesir. Berkaitan dengan perilaku masyarakat di bawah rezim otoritarian maka perlu dipergunakan konsep *civil society* untuk membantu proses pemahaman mengenai situasi negara Tunisia dan Mesir. Sebagai sebuah konsep, *civil society* muncul dan berkembang pada masyarakat barat. Bangsa Eropa secara turun temurun sampai abad ke-18 mengartikan *civil society* identik dengan pengertian negara (the state) yaitu suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok lain. Sehingga istilah *koinonia*

³¹ O'Donnel, G., & Schmitter, P., C. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

³² Riza Sihbudi. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Mizan Publika: Jakarta Selatan. Hal 279.

politike, societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschaft, dan civil society digunakan secara bergantian dengan istilah polis, civitas, etat, staat, state dan stato³³.

Civil society diterjemahkan dengan berbagai macam pengertian seiring dengan perkembangan politik dan ilmu pengetahuan. Ada yang mengartikan *civil society* sebagai masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, masyarakat kewargaan, dsb³⁴. Tetapi, pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Konsep *civil society* demikian jelas menawarkan wawasan alternatif bagi dua pilihan dikotomis yang selalu didengungkan oleh berbagai rezim otoriter di dunia: sistem politik yang sentralistis dan otoriter, atau kekacauan (*chaos*) yang ditandai oleh anarki, konflik komunal, dan disintegrasi. Konsep ini secara tegas mengisyaratkan kemungkinan timbulnya *civil liberties* yang bertanggung jawab, perbedaan pendapat yang nyata, dan pembentukan perserikatan-perserikatan secara sukarela, tanpa terkooptasi oleh jaringan-jaringan politik resmi³⁵.

Filsuf Jerman Hegel (1770-1831) barangkali merupakan orang pertama yang secara tegas membedakan konsep ‘negara’ dan *civil society*³⁶. Menurut Hegel, *civil society* adalah suatu ‘wilayah’ (sphere) perantara di antara wilayah ‘keluarga’ dan wilayah ‘negara’. Menurutnya, kaum borjuis yang mulai bermunculan di Eropa abad ke-17, melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan negara feodal maupun keluarga, sehingga menciptakan wilayah sosial baru yang ditandai oleh berbagai persaingan ekonomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran

³³ Hikam, Muhammad As. 1999. *Demokrasi dan CiviSociety*, LP3ES, Jakarta, hal 74

³⁴ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hal 3

³⁵ Alam, Bachtiar. 2006. *Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*. Antropologi Indonesia Vol. 30, No. 2. Universitas Indonesia

³⁶ Sassoon, A.S. 1983 ‘Civil Society’, dalam T. Bottmore, dkk. (peny) *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm.

jasa dan barang, serta perolehan harta. Wilayah sosial demikian oleh Hegel disebut *civil society* atau *bürgerliche Gesellschaft*. Tetapi, Hegel lebih lanjut menyatakan bahwa karena *civil society* merupakan arena persaingan ekonomi, maka terkandung potensi perpecahan, sehingga pada akhirnya negara, sebagai kekuasaan politik yang mengurus kepentingan umum, harus mengontrol *civil society* agar tidak mengalami disintegrasi.

Menurut Hegel dan Marx pemisahan antara negara dan masyarakat sipil adalah bagian khusus dari fitur politik modern, di dalam pemisahan hubungan politik mengambil bentuk dari pemisahan otoritas negara. Kata masyarakat sipil dan negara dianggap berdampingan. Dalam praktiknya dapat dikatakan untuk menjadi anggota dari masyarakat sipil, masyarakat harus menjadi anggota dari sebuah negara terlebih dahulu, dengan kata lain menjadi warga negara³⁷. Hegel dan Marx melihat hubungan antara negara dan *civil society* sebagai hubungan satu arah. Hegel melihat negara sebagai pengontrol *civil society*, sedangkan Marx melihat negara sebagai perpanjangan kepentingan ekonomi yang menguasai *civil society*³⁸. Melihat sepintas pendekatan idealis Hegel maupun materialis Marx seperti ini, sangatlah jelas bahwa—walaupun mereka mengakui *civil society* sebagai suatu arena sosial yang terpisah dari negara—mereka sangat menonjolkan ‘aspek negatif’ dari *civil society* sebagai ajang persaingan kepentingan ekonomi.

Dari tinjauan Marx dan Hegel terdapat poin penting yang menyimpulkan bahwa *civil society* mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan *civil society* dapat dikatakan sebagai arena sosial yang mengandung kepentingan-kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Dari penjelasan diatas wujud *civil society* dapat dikatakan terdapat pada

³⁷ A. Arato, 'Civil Society Against the State: Poland 1980-81', *Telos*, 47 (Spring 1981)

³⁸ Neocleous, Mark. 1996. *Administering Civil Society: Towards A Theory of State Power*. ST. MARTIN'S PRESS, INC., Scholarly and Reference Division, 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010

organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan (interest groups). Namun tidak semua dari kelembagaan *civil society* yang kuat dalam kemandiriannya ketika berhadapan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi, oleh karena kondisi *civil society* juga mengalami pasang surut dalam perkembangannya³⁹

Tunisia dan Mesir merupakan negara yang mengakui Islam sebagai agama utama di negaranya (Islam as state religion). Penduduk negara Tunisia dengan total sekitar 11 juta jiwa 98% beragama Muslim⁴⁰. Sedangkan rata-rata penduduk muslim di Mesir juga mencapai angka 90%⁴¹. Melihat fakta bahwa Tunisia dan Mesir merupakan negara Muslim maka keberadaan dari konsep *civil society* perlu disesuaikan. Menetapkan konsep *civil society* di dalam sebuah masyarakat yang mayoritas beragama Islam merupakan suatu isu yang mengarah pada suatu masalah diantara para ahli teori dan pelajar. Terdapat beberapa alasan mengapa pengaplikasian konsep *civil society* sulit dilakukan. Alasan utama adalah adanya argumen bahwa konsep *civil society* merupakan suatu produk dari negara-negara barat sehingga masyarakat non-barat tidak dapat mencanangkan *civil society* ke dalam hidup bernegaranya di situasi apapun.

Di dalam masyarakat Islam pre-modern aspek *civility* dan kohesi saling bertentangan. Walaupun otoritas politik terorganisir dengan baik dan terdapat konsentrasi kekuasaan pada level negara, keadaan masyarakat terfragmentasi dan keterpaduan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sangat rendah. Maka dari itu pemerintahan di suatu negara Islam

³⁹ Nuraini, Siti. 2007. Peranan Civil Society Dalam Negara Birokratik Otoriter. Jurnal Madani Edisi I/Mei, hal 74.

⁴⁰ Azra, Azyumardi. 2016. Tunisia; Islam dan Sekularisme, <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/04/27/o6aole319-tunisia-islam-dan-sekularisme>, diakses pada 11 Juni 2017

⁴¹ [Algouhary](https://www.quora.com/Is-Egypt-a-Muslim-country?), Mohamed. 2016. Is Egypt a Muslim Country?, <https://www.quora.com/Is-Egypt-a-Muslim-country?>, diakses pada 11 Juni 2017.

tidak dapat dipercaya dalam menjalankan sebuah bentuk masyarakat sipil⁴². Keberadaan masyarakat sipil tidak akan dapat terealisasikan di dalam masyarakat yang sektor produktivitasnya terionisasi, lemah dan terhambat dalam melakukan aksi. Islam dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang menentang adanya sekularisasi⁴³, mengetahui bahwa tidak ada garis batas yang jelas antara negara dan agama atau kepercayaan di dalam masyarakat muslim sehingga tidak terdapat pluralisme didalamnya, semakin mendukung pernyataan bahwa sangat sulit untuk menjalankan konsep *civil society* di negara Islam.

Alasan selanjutnya adalah beberapa ahli melihat dari sisi historis dan spesifikasi kultur dari konsep masyarakat sipil itu sendiri dan berargumen bahwa pengembangan dari konsep *civil society* adalah pencapaian dari bangsa Eropa, dengan demikian konsep *civil society* adalah suatu bukti untuk menegaskan supremasi dan hegemoni Eropa atas negara-negara lain di dunia. Konsep dari *civil society* dikatakan berakar dari tradisi intelektual liberal bangsa Eropa yang hanya dapat dimengerti lewat konteks demokrasi dan modernitas. Ide dari *civil society* sendiri merupakan produk dari “barat”, secara eksklusif Eropa, yang tidak dapat ditemukan di bagian negara lain⁴⁴. Para ahli teori *civil society* mengasumsikan bahwa terdapat beberapa prekondisi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan bentuk masyarakat sipil itu sendiri. Demokrasi dan kapitalisme juga *civility* tertentu dikategorikan sebagai hal yang harus dipenuhi untuk mencapai masyarakat sipil. Selain itu berjalannya pasar ekonomi secara plural juga merupakan ciri-ciri adanya masyarakat sipil. Segala kegiatan perekonomian mengacu pada pasar, bukan pemerintah, yang artinya campur tangan pemerintah dalam hal perekonomian harus minim⁴⁵.

⁴² Gellner, Ernest. 1994. *Conditions of Liberty: Civil Society and its Rival*. London: Hamish Hamilton, 64, 71–72, 82, 193

⁴³ *ibid*, hal 14

⁴⁴ Seligman, Adam. 1992. *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press.

⁴⁵ Diamond, Larry. 1994. “Rethinking Civil Society: Towards Democratic Consolidation,” *Journal of Democracy*, 5: 6, 4–18.

Adanya faktor individualisme dan kohesi sosial juga disebut sebagai faktor yang harus ada untuk mencapai sebuah bentuk masyarakat sipil, dan masyarakat Islam dianggap tidak dapat memenuhi faktor tersebut. Maka dari itu sangat disayangkan bagi masyarakat negara-negara Timur Tengah akan sulit untuk mewujudkan negara dengan masyarakat sipil didalamnya karena tidak dapat memenuhi karakteristik yang telah dijelaskan diatas⁴⁶. Menurut Beckman tetap ada kemungkinan bagi masyarakat negara Islam untuk mengarah ke bentuk masyarakat sipil dengan tipe patriarkal, komunis, fasis, dan liberal-demokratik⁴⁷.

Tetapi Herbert menyatakan bahwa kultur Islam tidak sesuai dengan diferensiasi struktural yang merupakan dasar dari masyarakat sipil baik secara normative atau praktikal⁴⁸, dengan kata lain kultur Islam tidak bertentangan dengan konsep dari masyarakat sipil dan secara teoritikal kemungkinan berkembangnya *civil society* di dalam konteks Islam. *Civil society* dikategorikan sebagai salah satu unsur yang mengancam pada negara-negara otoriter birokratik, karena dapat mempengaruhi proses politik. Negara takut atau khawatir terhadap politik massa rakyat, oleh sebab itu negara tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang dominan untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap *civil society* untuk mencegah massa rakyat di bawah dari keterlibatan politik yang terlampau aktif agar tidak mengganggu akselerasi industrialisasi⁴⁹.

Rakyat yang paling dikhawatirkan memiliki kekuatan dan niat untuk bertindak adalah masyarakat kelas menengah (middle class). Menurut Banerjee dan Duflo, kelas menengah dapat memengaruhi berjalan tidaknya suatu sistem di suatu negara dikarenakan kelas menengah dianggap memiliki hubungan dengan demokrasi. Masyarakat menengah dikatakan

⁴⁶ Norton, Andrew Richard. 1995 "Introduction," in Andrew Richard Norton, ed., *Civil Society in the Middle East* (Leiden: E.J. Brill, 1995), 1: 7–9, 12.

⁴⁷ Beckman, "Explaining Democratization," 2

⁴⁸ Herbert, *Religion and Civil Society*, hal 79 and 64

⁴⁹ Nuraini, Siti. 2007. Peranan Civil Society Dalam Negara Birokratik Otoriter. *Jurnal Madani Edisi I/Mei*, hal 74.

sebagai kelas yang mendorong pertumbuhan suatu negara, dan demokrasi dianggap memiliki hubungan kausal dengan pertumbuhan⁵⁰. Kelas Menengah sendiri didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terhimpun dalam suatu kelompok dalam suatu bentuk masyarakat kontemporer yang memiliki posisi secara ekonomi diantara *working class* dan *upper class*⁵¹.

Kelas menengah dianggap sebagai kelompok yang mempunyai kesempatan untuk mengecap pendidikan dan berkecukupan secara status ekonomi. Masyarakat kelas menengah dalam skala besar dikatakan dapat menstabilisasi pengaruh terhadap masyarakat lainnya. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan kecenderungan eksplosif yang mengarah pada gerakan revolusioner yang disinyalir oleh masyarakat tingkat rendah atau bahkan memiliki kecenderungan untuk mengancam keberadaan masyarakat kelas atas yang tentunya menguntungkan kelas menengah⁵².

Salah satu cara untuk mencapai masyarakat yang demokratis salah satunya lewat jalan revolusi. Pengertian revolusi tidak terbatas hanya pada pengertian politik saja, secara luas makna harafiah dari revolusi diukur dari sejauh apa suatu peristiwa dimaknai. Satu hal yang akan selalu ada saat suatu revolusi terjadi adalah adanya perubahan secara radikal atau fundamental. Terminologi revolusi memiliki kecenderungan berbeda pengertian pada setiap periode sejarah⁵³. Terdapat tiga pendekatan dalam memandang peristiwa revolusi, yakni kebudayaan, politis-ekonomi, dan murni politik⁵⁴. Pendekatan kebudayaan dapat dilihat dari berubahnya sistem nilai-nilai dasar masyarakat tertentu. Sedangkan pendekatan politis-

⁵⁰ Benerjee, Abhijit V & Duflo, Esther. 2008. What is Middle Class about the Middle Classes around the World, <https://economics.mit.edu/files/10881>, diakses pada 22 Agustus 2017

⁵¹ Weber, Max: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus». [www.autor-max-weber.de \(http://krotov.info/library/03_v/eb/er_05.html\)](http://krotov.info/library/03_v/eb/er_05.html)

⁵² Tarkhnishvili, Anna & Tarkhnishvili, Levan. 2013. Middle Class: Definition, Role and Development, Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture Volume 13 Issue 7 Version 1.0

⁵³ Close, David H. 1988. “*The Meaning of Revolution*” on journal *Revolution: a History of Idea*. Hal 3. United Kingdom

⁵⁴ Brugger, Bill & Hannan, Kate. *Modernisation and Revolution* on journal *Revolution: a History of Idea*. Hal 120. United Kingdom

ekonomi melihat revolusi sebagai perubahan sistem pasar dan perubahan perilaku masyarakat di kelas-kelas sosial yang memimpin pergerakan tersebut. Pendekatan politik secara murni melihat revolusi sebagai sebuah keruntuhan sebuah rezim sebagai suatu penyingkiran terhadap pimpinan suatu pemerintahan⁵⁵.

Revolusi dikatakan sebagai sebuah bagian dari dialektik hebat yang senantiasa meletus, mabadai, mengguntur, dan mabadai dimana manusia merupakan pelaku dialektik tersebut⁵⁶. Dalam pandangan dialektik sejak bangkitnya perasaan tertindas disitulah golongan yang menderita memulai kontradialektiknya. Tahap awal yang terjadi hanyalah adanya kesadaran bersama di dalam masyarakat yang ada dalam situasi tertindas. Lalu setelahnya akan dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki nasib dan saat terjadi suatu situasi yang mendukung maka disitulah revolusi terjadi. Dengan kata lain revolusi muncul dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sudah ada dan penggeraknya adalah golongan yang menderita⁵⁷

Komunikasi merupakan proses pertukaran simbol dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan mengubah sikap, pendapat, atau tindakan. Komunikasi dibagi ke beberapa kategori khusus yang salah satunya adalah Komunikasi Internasional⁵⁸. Komunikasi Internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melintasi batas-batas negara. Komunikasi Internasional menekankan kajian dan perhatian pada pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain sebagai realitas politik⁵⁹. Komunikasi Internasional juga merupakan komunikasi yang dilakukan oleh

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Driyarkara, Nicolaus. 2006. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Hal 639. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁵⁷ Ibid hal 640

⁵⁸ Shoelhi, Mohammad. 2009. *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik*. Simbiosis Rekatama Media.

⁵⁹ Maletzke, Gerhard.,1996, *Intercultural and International Communications*, VS Verlag für Sozialwissenschaften

komunikator suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan dan kerja sama, melalui berbagai media komunikasi atau media massa Internasional⁶⁰.

Terdapat bentuk-bentuk dari Komunikasi Internasional yang dibagi menjadi 6 bentuk yakni, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi politik, komunikasi massa, dan komunikasi antar-budaya⁶¹. Berkaitan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini terdapat perluasan dari teori Komunikasi Massa yang dianggap sesuai untuk menjelaskan permasalahan yang ada secara lebih dalam yakni, *Authoritarian Theory of Mass Communication*. Teori yang muncul dari pemikiran Plato (407-327 SM) ini diambil sebagai dasar dari penjelasan mengenai pemerintahan yang bersifat diktator, tetapi dapat pula dilihat dari sisi demokratisnya⁶².

Media massa dipengaruhi dan berada di bawah kekuasaan atau otoritas suatu negara. Media harus menghargai dan mengikuti kemauan dari otoritas yang ada serta berkerja berdasarkan dengan permintaan pihak yang berkuasa. Informasi beredar secara beragam lewat sistem media, ranah politik pun memanfaatkan keberadaan media. Siapapun aktor yang memiliki akses luas dan bebas terhadap sistem media dan apapun orientasi kepentingan mereka, maka dapat dikatakan mereka yang memiliki kuasa untuk pembentukan citra diri dan bahkan atas pemerintahan⁶³. Media tidak dapat bergerak secara mandiri dan segala hasil yang akan media publikasikan harus melalui proses sensor terlebih dahulu agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan penguasa.

⁶⁰ Effendy, Onong Uchjana.,1994, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung

⁶¹ Ibid

⁶² Mishra, Sneha., 2001, "Authoritarian Theory of Mass Communication", Businessstopia

⁶³ Castells, Manuel. 2010. The Rise of the Network Society. Blackkwell Publishing.

Media tidak diperbolehkan menyinggung cara kerja atau kebijakan yang partai berkuasa tentukan atau memberikan perlawanan terhadap grup mayoritas (dominan) dengan cara apapun. Teori ini membenarkan ungkapan bahwa negara sebagai aktor utama dianggap lebih baik dan penting keberadaannya dibandingkan dengan hak-hak individu yang ada didalamnya. Besarnya peran kaum otoritas pemegang kekuasaan dapat dilihat pula lewat pemberian ijin pada beberapa media untuk mempublikasikan sesuatu. Otoritas tertinggi memiliki hak untuk memberikan hukuman atau ancaman terhadap siapapun yang mencoba untuk merendahkan pemerintahan. Isu yang sensitif kebanyakan tidak diumumkan atau bila akan diumumkan harus melalui proses *press releases*. Keberadaan media yang digunakan sebagai senjata atau instrumen untuk memperkuat kekuatan dari pemerintahan dapat dianggap juga sebagai bentuk dari konsep propaganda.

Konsep *New media* kemudian muncul sebagai saluran alternatif dari adanya percakapan politik dan memperluas aktivitas politik. Konsep ini lahir dari seorang filsuf dari Kanada bernama McLuhan. Media baru tidak hanya berperan dalam penyebaran informasi, melainkan juga memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara dua arah. Secara umum, terdapat tiga elemen penting dari new media yang berkaitan dengan fungsi sosial, yaitu *communication*, *convergence*, dan *content (3C)*⁶⁴. Berbeda dari media massa tradisional yang menggunakan hanya “satu bentuk” untuk semua orang, *new media* bersifat “satu untuk satu” dan konsekuensinya terfragmentasi pada kelompok-kelompok sosial tertentu, yang memiliki akses dan kapabilitas teknologi untuk menggunakannya.

Berangkat dari konsep New Media oleh McLuhan, terdapat konsep lain yang perlu dapat mendukung penjelasan lebih lanjut mengenai media sosial yakni social networking sites. Sistem global jaringan *computer*, *server*, dan *internet* telah bertransformasi ke dalam banyak

⁶⁴ Marshall McLuhan, 1999. *Understanding Media; The Extension of Man*, The MIT Press: London, Hal.7.

aspek dari masyarakat modern dan interaksi sosial. Sejalan dengan perkembangan teknologi lahir yang disebut sebagai media sosial dan salah satu perkembangan yang signifikan berhubungan dengan media sosial adalah kemunculan *Social Networking Site*. *Social Networking Site* (SNS) atau biasa disebut juga jaringan sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui dunia maya seperti membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu member dengan member lainnya dalam sistem yang disediakan, dimana masing-masing memiliki ciri khas dan sistem yang berbeda-beda, beberapa contoh *Social Networking Site* diantaranya MySpace, *Facebook*, *Twitter*, *Cyworld*, and *Bebo*. Fungsi dari penerapan *Social Networking Site* itu sendiri berfokus pada koneksi yang akan dibangun oleh satu orang dengan orang lainnya, dimana dapat berupa hubungan antar kolega, event, profesi hingga bisnis dan pekerjaan⁶⁵

Peran Media Sosial dikatakan sebagai salah satu aspek yang fundamental dalam fenomena Hubungan Internasional kontemporer. Keberadaannya sebagai alat komunikasi yang bersifat *two-way communication* membuat media sosial menjadi instrumen yang diminati masyarakat. Sebagai versi digital dari *word-of-mouth*, sosial media menjadi jalan baru untuk menangkap, menganalisa, menginterpretasi, dan mengatur konten-konten yang disebarkan. Konsep ini merupakan konsep kajian media baru atau teori media baru yang fokus digunakan untuk memberikan elaborasi mengenai bagaimana pengaruh demokratisasi di Tunisia bisa menyebar ke negara-negara Arab di Timur Tengah lainnya. Marshall McLuhan menyatakan bahwa, medium yang dipakai untuk menyampaikan informasi dan pesan, membentuk format pesan itu sendiri. McLuhan menganggap media sebagai perluasan manusia, dan bahwa media

⁶⁵ Boyd, d. and Ellison, N. B. (2007). 'Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship'. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13/2: 210–230.

yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda. Media menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia⁶⁶.

Pengaruh media dengan adanya kemajuan teknologi menjadi sangat dahsyat bagi umat manusia. Media telah campur tangan dalam kehidupan manusia secara lebih cepat daripada sebelumnya, juga memperkecil jarak diantara bangsa-bangsa. Beliau juga memiliki argumentasi bahwa media akan mengubah individu dan masyarakat. Pola dari frekuensi komunikasi dan interaksi yang dilakukan lewat media sosial dikatakan merubah perilaku masyarakat selamanya. Efek dari media sendiri terhadap masyarakat lebih besar dari konten yang disajikan oleh media sendiri. Bila kita menggunakan argumentasi McLuhan maka kita menyetujui pernyataan bahwa media sosial akan mengubah pengguna bukan disebabkan oleh konten yang disajikan tetapi dikarenakan cara dari komunikasi tersebut. Perlu disadari perubahan perilaku yang dikarenakan penggunaan media sosial dan mengadopsi sikap penerimaan akan keberadaan teknologi itu sendiri⁶⁷.

Teerdapat 7 fungsi dari ICT dalam suatu pergerakan, yang pertama adalah fungsi untuk melaporkan berita dan menyebarkan informasi. Fungsi kedua adalah adanya konfirmasi atas berita dan informasi yang disebarkan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk mengkoordinasikan, komunikasi, informasi dan organisasi. Fungsi keempat adalah fungsi mobilisasi dari dari sumber daya yang tersedia. Kemudian fungsi yang kelima dikatakan sebagai *self-organization* yang diikuti dengan *motivation* dan fungsi yang terakhir yakni

⁶⁶ opcit

⁶⁷ Pan, B., & Crotts, J., 2012, Theoretical models of social media, marketing implications, and future research directions. In Sigala, M., Christou, E., & Gretzel, U. (Eds.), "*Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Case*"s, hal 73-86. Surrey, UK: Ashgate.

mobilisasi suatu kelompok⁶⁸. Dari perspektif Christakis dan Fowler, Internet dikatakan berhasil memodifikasi empat cara interaksi jaringan sosial sebelumnya, yakni *enormity*, *communalilty*, *specificity*, dan *virtuality*. Terdapat suatu bentuk hubungan baru antara keberadaan media sosial dengan gerakan sosial. Terdapat peningkatan koneksi antar individu yang disebabkan oleh keberadaan media sosial yang kemudian meningkatkan kemungkinan penyebaran informasi dan peningkatan pada aksi yang dilakukan secara kolektif demi mencapai tujuan umum. Keberadaan media sosial berhasil membangun bentuk komunikasi yang berbeda baik itu formal maupun informal dan baik untuk *public circle* atau kelompok sepermainan dengan latar belakang kondisi dan kepentingan yang berbeda.

Kemudian konsep perbandingan politik juga akan disertakan untuk membantu melihat bahwa Tunisia dan mesir merupakan dua Negara yang berbeda latar belakang juga motif munculnya gerakan demokratisasi. Perbandingan politik merupakan salah satu bagian dari ilmu politik yang dapat dikatakan sebagai metode atau pendekatan dari studi politik. Subjek dari perbandingan politik adalah politik domestik suatu negara atau individu. Perbandingan yang melihat dari sisi politik domestik suatu Negara berarti membandingkan intitusi politik domestik, proses, kebijakan, konflik dan perilaku dari masing-masing Negara⁶⁹. Studi hubungan internasional yang mempelajari mengenai kebijakan luar negeri serta interaksi antar Negara, juga studi mengenai organisasi internasional dan hal-hal yang bersifat antar Negara tentunya berkorelasi dengan konsep perbandingan politik.

Dalam era global terkadang persoalan domestik dan internasional saling berhubungan dan menghasilkan kesinambungan yang pada akhirnya tercampur dan tidak ada batasan yang jelas. Dalam hubungan internasional dijelaskan bahwa perilaku satu Negara dengan Negara

⁶⁸ Patrut, Bogdan. 2014. *Social Media in Politics: Case Studies on The Political Power of Social Media*, Springer International Publishing, hal 39

⁶⁹ Kesselman, Krieger, Joseph. 2009. *Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas*, Brief Second Edition. Wadsworth.

lainnya akan membentuk suatu interaksi yang pada akhirnya berhubungan dan mempengaruhi satu Negara terhadap Negara lainnya. Maka dari itu suatu Negara membutuhkan formula yang tepat saat akan mengeluarkan suatu kebijakan karena berangkat dari suatu kebijakanlah sistem suatu Negara akan dapat dinilai keefektifannya. Dalam tatanan global, tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat situasi serupa yang dialami oleh Negara dari berbagai belahan dunia. Tetapi, tidak berarti bahwa situasi yang serupa tersebut muncul dari sebab akibat yang sama. \Di dalam Skripsi ini akan dibandingkan kebijakan dan perilaku yang diambil dari Negara Tunisia dan Mesir yang sama-sama mengalami proses demokrasi dalam pemerintahannya lewat pergerakan masyarakat yang didukung oleh platform media sosial. Beberapa konsep dan teori yang telah dijabarkan diatas dianggap dapat membantu penulis untuk menentukan dan menjawab rumusan masalah mengenai peran dari *Facebook* dan *Twitter* dalam proses demokratisasi di Tunisia dan Mesir.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode dengan model kualitatif dan tipe analisis isi. Penelitian kualitatif merupakan proses memahami masalah-masalah sosial dan politik dengan kata-kata dan sudut pandang informan. Penelitian kualitatif ini cenderung menggunakan pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat ikut serta dalam mengekspresikan pandangan mereka dan proses dari penelitian kualitatif sebagian besar bersifat induktif yang dapat memberikan sebuah gambaran atau peristiwa dari kegiatan penelitian terhadap data yang ada di lapangan⁷⁰. Analisis isi sendiri merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Metode ini

⁷⁰ Creswell, John W. 2002. *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 4th Edition*. Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116

dipandang mampu untuk mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Melalui metode penelitian ini, penulis bermaksud memberikan gambaran secara sistematis sehubungan dengan fenomena yang sedang dikaji serta ikut terlibat dalam meneliti kasus terkait. Akan disertakan juga metode berbasis internet. Penggunaan internet dilakukan untuk mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi tertentu yang mendukung penelitian⁷¹.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang memiliki fungsi untuk menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan suatu masalah. Melalui jenis penelitian studi kasus ini, penulis dapat memahami fenomena atau situasi yang terjadi.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik data sekunder. Penelitian dengan data sekunder merupakan penelitian yang sistem pengolahan datanya berbasis data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)⁷². Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data-data yang bersifat primer, diambil dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga survey resmi yang bergerak di bidang kajian media sosial yang berhubungan dengan Tunisia dan Mesir pada periode 2010-2011, seperti data dari lembaga Arab Social Media Report untuk mendukung penelitian. Indikator yang akan diambil dari jurnal yang berkaitan dengan media sosial

⁷¹ Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Hal 176-178. Pustaka pelajar

⁷² Vartanian, T. P. (2011). *Secondary data analysis*. New York, NY: Oxford.

Facebook dan *Twitter* adalah jumlah post yang dibagikan lewat *Twitter* yang berhubungan dengan gerakan di Tunisia dan Mesir selama periode waktu yang disebutkan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini terbagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab 1. Pada bab satu penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah berupa pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan untuk penelitian ini.

Bab 2. Pada bab dua penulis mendeskripsikan tentang jenis rezim yang dijalankan dalam pemerintahan Tunisia dan Mesir sebelum terjadi gerakan massa. Akan dijabarkan pula permasalahan apa yang terjadi di Tunisia sehingga mendukung terjadinya gerakan massa dan bagaimana gerakan tersebut memberikan dampak pada Mesir. Hubungan antara kedua negara dengan masyarakat sipil juga akan disisipkan untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana situasi kehidupan bernegara di Tunisia dan Mesir. Tujuan pokok dari bab ini adalah membuktikan bahwa rezim pemerintahan di Tunisia dan Mesir merupakan rezim otoritarian

Bab 3. Pada bab tiga penulis akan mendeskripsikan penggunaan media sosial khususnya *Facebook* dan *Twitter* sebagai alat pencapaian tujuan demokratisasi di Tunisia dan Mesir. Akan disertakan pula data angka yang menunjukkan signifikansi penggunaan dua media sosial tersebut selama terjadinya gerakan-gerakan revolusi di wilayah terkait. Pada bab ini terdapat bagian analisa upaya-upaya Tunisia dan Mesir meraih demokratisasi dan peran media sosial yang ikut serta membantu dengan menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana

Dukungan Media Sosial Dalam Mendorong Proses Transisi Menuju Masyarakat Demokratis
Tunisia dan Mesir (Studi Kasus: *Facebook* dan *Twitter*) ?”

Bab 4. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan.